

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Bai' al-Istishna'

Sebelum penulis membahas mengenai pengertian istishna, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian akad. Akad secara bahasa berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan *ar-rabt*. sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut penulis (Prof. Syamsul anwar), akad adalah, pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul¹.

Lafal *istishna'* berasal dari akar kata *shana'a* () ditambah alif, *sin*, dan *ta'* menjadi *istisna'a* () yang sinonimnya , **يصنعه** artinya

¹ Prof. Dr. Syamsul Anwar M.A, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

: “meminta untuk dibuatkan sesuatu”. Pengertian *istishna*’ menurut istilah tidak jauh berbeda dengan menurut bahasa. Wahbah zuhaili mengemukakan pengertian menurut istilah ini sebagai berikut :

تعريف الإستصناع هو عقد مع صانع علي عمل شيء معين في الذمة, أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع و تكون العين ولعمل من الصنع.

Artinya :

Defenisi istishna’ adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian ; yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.”

Ali Fikri memberikan defenisi *istishna*’ sebagai berikut :

لإستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص ما دته من

Artiniya :

”Istishna’ adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang)”². Istishna’ berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah berarti akad jual beli dimana shani’ (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dan mustashni’ (pemesan)³. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Istishna’ adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual⁴.

Menurut ulama Fiqh, *istishna*’ sama dengan jual beli *salam* dari segi objek pesannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan cirri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Perbedaannya : pembayaran pada jual beli *As-salam* diawal sekaligus, sedangkan pembayaran

² <http://syaifulanwar2simamora.blogspot.sg/2012/12/fiqh-muamalah-bai-istishna.html>

³ Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2010), h.359.

⁴ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada,2011), h.199.

pada *Bai' al-istishna'* dapat diawal, ditengah, dan di akhir sesuai dengan perjanjian⁵.

Sedangkan menurut kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istishna'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya, sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu,” buatkan untukku sesuatu barang dengan harga sekian”, dan orang tersebut menerimanya, maka akad *bai' al-istishna'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini⁶.

Berdasarkan pemikiran dari mazhab Imam Hanafi, ada beberapa alasan yang mendasari diizinkan transaksi berdasarkan *bai' al-Istishna'* ini⁷, yaitu:

1. Masyarakat banyak mempraktikkan *bai' al Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa adanya keberatan dan keterpaksaan sama sekali.
2. Keberadaan *bai' al-Istishna'* selama ini didasarkan akan kebutuhan orang banyak, bisa terjadi orang yang memerlukan barang yang selama ini tidak ada dipasaran, akan tetapi ia lalu membuat kontrak pembelian agar ada orang yang membuatkan barang tersebut bagi mereka.
3. *Bai' al-Istishna'* diizinkan selama sesuai dengan aturan umum kontrak *bai' al-istishna'* yang sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Menurut Az-Zuhaili, *bai' al- Istishna'* ialah kontrak jual beli antara pembeli (*mustashni'*) dengan cara melakukan pemesanan pembuatan barang barang, dimana kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran,

⁵ Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Raja Gramedia Pustaka Utama,2009), h. 408.

⁶ Mardani, *Ayat-ayat dan hak Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press,2011),h.62.

⁷ Zulkifli Sunarto, *Panduan praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakrta : Zikrul Hakim, 2003), H.86.

apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan pada masa yang akan datang⁸.

Adapun menurut Fatwa DSN MUI, dijelaskan bahwa *bai' al-Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustshni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)⁹.

Pada dasarnya, *bai' al-istishna'* merupakan suatu transaksi yang hampir sama dengan *bai' as-Salam* dan jual beli murabahah *mua'jjal*, namun sedikit terdapat perbedaan diantara ketiganya, dimana dalam *bai' as-salam* pembayaran dimuka dan penyerahan barang nya dikemudian hari, sedangkan pada *murabahah mua'jjal* barang diserahkan dimuka dan uangnya bias dibayar dengan cicilan, dan dalam *bai' al- Istishna'*, barang diserahkan dibelakang, sedangkan pembayarannya juga bisa dilakukan dengan cicilan¹⁰.

Karena tidak mengandung pelarangan terhadap apapun, dan telah terjadi praktik yang umum dimasyarakat karena kemudahan bagi umat manusia¹¹. *Ba'I al-Istishna'* berevolusi ke ilmu hukum Islam secara histori karena kebutuhan tertentu dalam area pekerjaan manual. Namun, ia telah berkembang dalam era modern sebagai salah satu kontrak (akad) yang memungkinkan pemenuhan proyek dan industri. Oleh sebab itu, keunggulan kontrak untuk menufaktur telah meningkat dengan cakupan proyek yang dibiayai. Jual beli dengan tempo pembayaran dibolehkan secara *syar'i*.

⁸ Muhammad ayyub op cit, h. 412.

⁹ Adiwarman A. Karim, op.cit, h.124

¹⁰ Muhammad Ayyub, loc . cit.

¹¹ *Ibid* h. 124

Sebagaimana dibolehkannya jual beli dengan pembayaran kontan, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan juga dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, “ barang siapa yang berhutang dengan kurma, maka hutangnya tersebut harus jelas takarannya, jelas timbangannya dan jelas tempo pembayarannya”.¹²

Bai' al-Istishna' merupakan akad yang sah dan praktik bisnis yang umum dilakukan, sebagai salah satu cara atau model transaksi yang telah disahkan yang berdasarkan kepada *istihsan* (kepentingan masyarakat).

B. Dasar Hukum Bai' al-Istishna'

Mengingat *bai' al-Istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as salam* juga berlaku untuk *bai' al-Istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut kebasahan *bai' al-Istishna'* dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *bai' al-Istishna'* atas dasar *istihsan* karena alasan-alasan berikut ini :

1. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-Istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus secara umum¹³.

¹² Ahmad Asy-Syarbashi, *yas alunka Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*, (Jakarta: Lentera, 2006), Cet. Ke-2, h.187.

¹³ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet.ke-1, h.53.

2. Keberadaan *bai' al-Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat banyak yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
3. *Bai' al-Istishna'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syari'ah¹⁴.

Sebagian Fuqoha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-Istishna'* sah atas dasar qiyas dan aturan umum Syari'ah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang yang dipesan tersebut pada saat penyerahan barang sesuai dengan perjanjian, demikian juga dengan kemungkinan terjadinya perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi pada barang tersebut¹⁵.

Dalam buku fiqh muamalah karangan Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Istishna'* dibolehkan atas dasar kebiasaan manusia dan akad *salam*, syarat-syarat yang berlaku pada *salam* juga berlaku pada akad *bai' al-Istishna'*¹⁶.

Hukum *bai' al-Istishna'* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. Adapun dalil yang membolehkan *bai' al-Istishna'* adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'anul karim

Landasan hukum *bai' al-Istishna'* :

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insane, 2008), h. 114

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 253.

QA.Al-baqarah : Ayat 282



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(QS. Al-Baqarah : 282)¹⁷.

Q.S. Al-Baqarah : ayat 275



Artinya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al Baqarah : 275)¹⁸.

Dari dua ayat Al-Qur'an diatas Allah SWT menerangkan bahwa telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, juga menerangkan tuntunan tentang bermu'amalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya, *bai' al-Istishna'* merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia, yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu, dan tidak ada seorang sahabat atau ulamapun yang mengingkarinya.

2. As-Sunnah.

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجُلًا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُبَرِّ فَقَالَ
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةِ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ
مُرِّي غُلَامَكَ التَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ
يَعْمَلُهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْعَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ *

¹⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahaan*, (Semarang : PT Toha Putra, 2006), h. 48.

¹⁸ ibid

Artinya :

Dari Abu Hazim, ia berkata: Ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa'ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasulullah saw mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal, " Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika saya nasehat pada manusia." Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya pada Rasulullah saw. Maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya. (HR Bukhari, Kitab al-Buyu')¹⁹

C. Rukun dan Syarat bai' al-Istishna'

1. Rukun Istishna'

Bai' al-Istishna' merupakan salah satu pengembangan *bai' as-salam*, waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan²⁰. Karena *bai' al-Istishna'* merupakan akad khusus dari *bai' as-salam* maka ketentuan dan landasan hukum Syariah *bai' al-Istishna'* mengikuti ketentuan *bai' as-salam*, adapun rukun *bai' al-Istishna'*.

- a. Penjualan atau penerima pesanan (*shani'*)
- b. Pembeli atau pemesan (*mustshni'*)
- c. Barang (*mashnu'*)
- d. Harga (*tsaman*)
- e. Ijab qabul (*shighat*)

¹⁹ . Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Abu suhaib karmi, (Saudi Arabia, Baitul afkar dauliyah linnasri, 1419 H/ 1998 M), hadis ke 2094, h.395.

²⁰ Sumarto Zulkifli, *panduan praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta :Zikrul Hakim,2003), h.41-42

2. Sedangkan syarat-syarat *Istishna'* adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji
- c. Apabila isi akad disyaratkan *shani'* (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *Istishna'*, tetapi menjadi akad *ijarah* (sewa-menyewa)²¹.
- d. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu.
- e. *Mashnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dll.
- f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudhratan²².

D. Macam-macam Jual Beli

1. Ditinjau dari sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian.

a. Jual beli *shahih*

Jual beli yang *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan kata lain jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik rukun maupun syaratnya.

²¹ Nurul Huda, loc.cit., h.55

²² Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: LPFEusakti, 2006), h. 182-183.

b. Jual beli *ghairu shahih*

Jual beli *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli yang batil, atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi rukunnya namun tidak pada sifatnya. Dan ini juga dinamakan jual beli fasid.

2. Ditinjau dari segi sighat-nya, jual beli terbagi kepada dua bagian:

a. Jual beli mutlak

Jual beli mutlak adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

b. Jual beli *ghair mutlak*

Jual beli *ghair mutlak* adalah jual beli yang sighatnya dikaitkan atau disertai dengan syarat atau sandaran kepada masa yang akan datang.

3. Jual beli dari segi hubungan dengan barang yang dijual (objek akad) terbagi empat bagian:

a. Jual beli *Muqayyadah*

Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli barang dengan barang seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula.

b. Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain.

c. Jual beli *Salam* dan *Istishna'*

Jual beli *salam* adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga pembayaran segera tunai. Sedangkan jual beli *Istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Dalam hal pembayaran, transaksi *Istishna'* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang²³.

E. Sifat akad bai'al-Istishna'

Akad *Istishna'* adalah akad *ghairi lazim* (tidak mengikat), baik sebelum pembuatan pesanan maupun setelah pembuatan pesanan, oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani'* membuat barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *shani'* maka hukum akad sah, karena adanya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan²⁴.

²³ Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), h. 254.

²⁴ Ahmad Wardi muslich, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet . ke-1, h. 225

Apabila pembuat (produsen) membawa barang yang dibuatnya kepada (pemesan), maka hak khiyarnya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Apabila (konsumen/pemesan) telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak khiyar. Apabila ia menghendaki ia boleh meninggalkannya dan membatalkan akadnya. Ini menurut imam Abu hanifah dan Muhammad. Alasannya adalah karena ia membeli sesuatu yang belum dilihatnya, oleh karena itu ia berhak atas khiyar. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila (konsumen) telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat), dan tidak ada hak khiyar, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad yang kedudukannya sama seperti dalam akad *salam*, yakni tidak ada khiyar. Disamping itu, hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari pembuat (produsen) karena telah rusak bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan konsumen, dan untuk dijual kepada orang lain juga belum tentu ada yang mau .

Adapun ketentuan penyediaan barang dan penyerahan barang dalam akad pembiayaan *bai al-Istishna'* adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, nasabah memiliki hak untuk :
 - a. Membatalkan akad dan meminta pengembalian dana
 - b. Menunggu penyerahan barang tersedia

- c. Atau meminta untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis
2. Dalam hal menyerahkan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih tinggi, perusahaan penyedia barang tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antar pemesan dengan pihak perusahaan atau produsen.
3. Ketika pihak perusahaan menyerahkan barang kepada pemesan dengan kualitas yang lebih rendah dan pihak pemesan sukarela menerimanya maka pemesan tidak boleh meminta pengurangan harga.

F. Sanksi Penundaan Dalam Pemenuhan Kewajiban

Akad *Istishna'* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan produk yang dipesan. Kompensasi yang demikian ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan. Selain itu, tidaklah diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan dalam pembayaran karena hal ini bersifat riba. Potongan sukarela untuk pembayaran lebih awal diperbolehkan, asalkan tidak ditentukan dalam akad (kontrak). Dengan kata lain dapat pula disetujui kedua belah pihak bahwa dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan harga dikurangi dalam jumlah tertentu.

Para ulama dalam hal ini memutuskan berdasarkan analogi. Para fuqoha memperbolehkan kondisi yang demikian dalam *ijarah*, misalnya jika seseorang menyewa jasa seorang penjahit, ia dapat mengatakan kepadanya bahwa

upahnya adalah sebesar 10 dirham jika ia mempersiapkan pakaiannya dalam seminggu dan 12 dirham bila selesai dalam waktu dua hari. Berdasarkan analogi, para ahli memperbolehkan klausul sanksi dalam perjanjian *istishna'* dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, pemasokan, atau pembangunan subjek *istishna'* ada beberapa resiko dalam akad *Istishna'*, yaitu :

a. Resiko penyerahan

Terjadi keterlambatan penyerahan barang seperti yang telah dijadwalkan atau disepakati.

b. Resiko harga

Harga komoditas bisa lebih rendah dari harga pasar atau harga yang tadinya diharapkan/ dianggap sesuai saat penyerahan.

c. Resiko kredit

Yaitu resiko apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran konsumen²⁵.

²⁵ Muhammad Ayub, *understanding Islamic Finance A-Z keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), h.417